
INDIKATOR EKONOMI KABUPATEN NATUNA TAHUN 2014

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

ISSN	: -
Ukuran Buku	: 16 x 21 cm
Jumlah Halaman	: vi + 51 halaman
Naskah	: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna
Layout dan Gambar Kulit	: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna
Diterbitkan Oleh	: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NATUNA**

Puji dan Syukur kami persembahkan kehadirat Tuhan YME, karena atas ridho dan karunia-Nya sehingga publikasi "Indikator Ekonomi Kabupaten Natuna Tahun 2014" ini bisa dapat diselesaikan.

Topik yang diangkat dalam publikasi ini mengenai kondisi perekonomian di Kabupaten Natuna. Secara khusus, publikasi ini membahas tentang pertumbuhan ekonomi, perkembangan harga bahan pokok, pertanian, pariwisata, dan beberapa indikator ekonomi lainnya.

Data yang digunakan untuk penulisan publikasi ini berasal dari survei BPS Kabupaten Natuna serta dari dinas/instansi terkait.

Demikian publikasi ini disusun, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Ranai, Desember 2015

**Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Natuna**

BUSTAMI



Kata Pengantar Kepala BPS Kabupaten Natuna	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan dan Manfaat	5
1.3 Sumber Data	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II PERTANIAN	8
2.1 Sub Sektor Tanaman Pangan	9
2.2 Sub Sektor Perkebunan	15
2.3 Sub Sektor Peternakan	19
2.4 Sub Sektor Perikanan	20
BAB III HOTEL DAN PARIWISATA	24
3.1 Hotel	25
3.2 Pariwisata	27
BAB IV INDEKS HARGA	30
4.1 Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi	32



BAB V PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	37
5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	39
5.2 Struktur Perekonomian	43
BAB VI KEUANGAN	46
6.1 Realisasi APBD	47

<http://natunakab.bps.go.id>



Halaman

Tabel 2.1 Luas Tanam Bahan Makanan Menurut Komoditas dan Kecamatan Tahun 2014 (Ha)	10
Tabel 2.2 Luas Panen Bahan Makanan Menurut Komoditas dan Kecamatan Tahun 2014 (Ha).....	13
Tabel 2.3 Jumlah Produksi Bahan Makanan Menurut Komoditas dan Kecamatan Tahun 2014 (Ha).....	15
Tabel 2.4 Luas Lahan Tanaman Perkebunan Menurut Komoditas dan Kecamatan Tahun 2014 (Ha).....	17
Tabel 2.5 Jumlah Produksi Perkebunan Menurut Komoditas dan Kecamatan Tahun 2014 (Ton).....	18
Tabel 2.6 Jumlah Ternak dan Unggas Menurut Kecamatan Tahun 2014 (Ekor).....	20
Tabel 2.7 Jumlah RTP, Keramba, dan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan Tahun 2014.....	21
Tabel 2.8 Jumlah RTP dan Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan Tahun 2014	23
Tabel 3.1 Banyaknya Perusahaan Akomodasi/Hotel Non Bintang Menurut Kecamatan Tahun 2014.....	27



Tabel 3.2 Jumlah Objek Wisata Menurut Jenis dan Kecamatan Tahun 2014.....	29
Tabel 4.1 Laju Inflasi Kabupaten Natuna Tahun 2012-2014 (persen).....	33
Tabel 4.2 Indeks Harga Konsumen, Laju Inflasi Kabupaten Natuna Tahun 2014.....	35
Tabel 5.1 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Milyar Rupiah).....	40
Tabel 5.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha, 2011-2014 (Persen).....	42
Tabel 5.3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2014 (Milyar Rupiah).....	44
Tabel 6.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna, 2013-2014 (Rp).....	49



Gambar 4.1 Laju Inflasi Natuna, Batam dan Tanjung Pinang Tahun 2014.....	36
Gambar 5.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna 2011-2014 (Persen).....	41
Gambar 5.2 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014.....	45
Gambar 6.1 Realisasi Penerimaan Pajak Menurut Jenis Pajak Daerah, 2014.....	50

<http://natunakab.pps.go.id/>

BAB I
PENDAHULUAN

<http://naturalab.bps.go.id>



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Atas dasar itulah berbagai daerah di Indonesia berlomba-lomba untuk memajukan daerah serta menyejahterakan masyarakatnya melalui pemerintah daerah, termasuk di bidang perekonomian. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.



Masalah-masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, serta daya fisik secara lokal. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya bidang perekonomian sering terjadi ketimpangan di berbagai wilayah. Hal ini antara lain disebabkan oleh:

- Konsentrasi Pembangunan Ekonomi

Setiap daerah memiliki usaha masing-masing untuk memperoleh pendapatan yang tinggi, salah satunya dengan memberikan penekanan pada bidang-bidang tertentu yang menjadi konsentrasi pembanguana.

- Alokasi Investasi

Inventasi yang dilakukan pihak asing di daerah-daerah juga mempengaruhi ketimpangan pembangunan karena untuk berinvestasi investor akan memilih daerah yang memiliki infrastruktur dan sumber daya yang memadai.

- Perbedaan Sumber Daya Alam



Sumber daya alam yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda dan tentunya mempengaruhi pembangunan di daerah masing-masing.

- Kurang Lancarnya Perdagangan Antar Provinsi

Kondisi wilayah yang berbeda-beda, terdiri dari daratan dan lautan membuat akses perdagangan antar provinsi dan antar kabupaten menjadi salah satu penentu pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Untuk dapat melaksanakan pembangunan daerah dengan sebaik-baiknya diperlukan kerjasama dari semua pihak terkait, mulai dari masyarakat, swasta, akademisi, sampai dengan pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan. Dalam hal ini perlu kiranya pemerintah daerah menggunakan data dan informasi yang akurat dalam pembangunan ekonomi daerah, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat terarah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing.



1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat dari disusunnya publikasi Indikator Ekonomi Kabupaten Natuna 2014 ini adalah untuk mengetahui indikator apa saja yang terkait dengan perekonomian daerah, khususnya Kabupaten Natuna. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak terkait baik dari masyarakat sipil, akademisi, maupun pihak pemerintah daerah dapat memanfaatkan data tersebut sesuai bidang dan kepentingannya masing-masing.

Secara khusus, tujuan dari penulisan publikasi ini adalah sebagai berikut:

- Memberikan gambaran mengenai sektor pertanian yang merupakan sektor dimana sebagian besar penduduk Kabupaten Natuna bekerja dan memperoleh pendapatan.
- Memberikan informasi mengenai pariwisata dan perhotelan di Kabupaten Natuna.
- Melihat perkembangan harga-harga di Kabupaten Natuna melalui angka inflasi



- Memberikan informasi mengenai struktur dan pertumbuhan ekonomi penduduk Kabupaten Natuna.
- Memberikan informasi mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna.

1.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini berasal dari data primer dan data sekunder. Adapun data sekunder diperoleh dari dinas/instansi terkait, seperti Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dll. Sedangkan untuk data primer diperoleh dari hasil berbagai survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Beberapa Survei yang terkait dengan penyusunan publikasi ini antara lain : Survei Harga Konsumen (HK), Survei Perhotelan Tahunan (VHTL), dll.



1.4 Sistematika Penulisan

Publikasi ini disusun dalam enam bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan dan manfaat, sumber data, serta sistematika penulisan.

BAB II : Pertanian berisi tentang sektor pertanian yang terdiri dari Sub Sektor Tanaman Pangan, Sub Sektor Perkebunan, Sub Sektor Peternakan dan Sub Sektor Perikanan.

BAB III : Hotel dan Pariwisata berisi tentang data Perhotelan dan Sektor Pariwisata di Kabupaten Natuna.

BAB IV : Indeks Harga menyajikan data tentang Indeks Harga Konsumen (IHK) dan laju inflasi di Kabupaten Natuna.

BAB V : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menyajikan tentang struktur serta laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Natuna.

BAB VI : Keuangan menyajikan tentang informasi realisasi APBD Kabupaten Natuna tahun 2013 dan 2014.

***BAB II
PERTANIAN***

<http://naturalab.bps.go.id>



BAB II

PERTANIAN

Sektor Pertanian memiliki peranan yang cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Natuna. Sektor pertanian ini terdiri dari sub sektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, sub sektor peternakan dan sub sektor perikanan. Kondisi wilayah Kabupaten Natuna yang berbentuk kepulauan sangat berpotensi untuk lebih berkembangnya sektor pertanian ini, khususnya sub sektor perikanan.

2.1 Sub Sektor Tanaman Pangan

Tanaman pangan dalam hal ini adalah tanaman yang umumnya mengandung karbohidrat dan protein, seperti padi, tanaman palawija dan umbi-umbian. Luas tanam bahan makanan di Kabupaten Natuna mengalami penurunan lebih dari 30 persen, dari 553 Ha di tahun 2013 menjadi 365 Ha di tahun 2014. Sebagian besar luas tanam tanaman pangan mengalami penurunan, seperti padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Persentase penurunan luas tanam terbesar adalah



tanaman ubi kayu, yaitu hampir 70 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 luas tanam ubi kayu mencapai 134 Ha dan pada tahun 2014 luas tanamnya turun menjadi 41 Ha saja.

Tabel 2.1 Luas Tanam Bahan Makanan Menurut Komoditas dan Kecamatan Tahun 2014 (Ha)

Kecamatan	Padi	Jagung	Kedelai	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Midai	-	1	2	1	-	-	4
2. Bunguran Barat	55	14	14	14	4	16	117
3. Bunguran Utara	-	4	5	1	-	-	10
4. Pulau Laut	-	-	-	-	-	-	-
5. Pulau Tiga	-	2	2	-	-	-	4
6. Bunguran Timur	-	3	2	-	-	-	5
7. Bunguran Timur Laut	-	-	-	-	-	-	-
8. Bunguran Tengah	11	5	3	-	3	2	24
9. Bunguran Selatan	-	9	9	7	1	8	34
10. Serasan	-	15	11	10	1	-	37
11. Subi	3	-	1	-	-	-	4
12. Serasan Timur	90	15	12	8	1	-	126
2014	159	68	61	41	10	26	365
2013	215	88	10	134	87	19	553

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Natuna



Meskipun secara keseluruhan luas tanam tanaman pangan tahun 2014 mengalami penurunan, ada juga yang mengalami peningkatan yaitu kedelai dan kacang tanah. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, pada tahun 2014 ini luas tanam kedelai meningkat enam kali lipat lebih. Sedangkan luas tanam kacang tanah meningkat 3,68 persen dari luas tanam tahun sebelumnya yaitu 19 Ha menjadi 26 Ha.

Terjadinya kenaikan ataupun penurunan luas tanam berbagai tanaman pangan setiap tahunnya disebabkan oleh keadaan cuaca dan juga keinginan dari para petani itu sendiri. Jika cuaca sedang tidak mendukung untuk menanam suatu tanaman pangan tertentu, mereka cenderung beralih menanam tanaman pangan yang lain, misalnya pada musim kemarau sawah yang biasa ditanami tanaman padi, kini dialihkan untuk tanaman palawija, seperti kedelai. Selain itu, para petani di Kabupaten Natuna juga bergantung kepada pemerintah daerah, khususnya para petani padi, di mana sebagian besar bibit dan pupuk berasal dari bantuan pemerintah. Jika ada bantuan dari pemerintah daerah mereka akan menanam padi,



jika tidak maka sebagian besar lahan yang mereka miliki tidak akan ditanami.

Jika dilihat dari sisi kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna, maka Kecamatan yang memiliki luas tanam tanaman pangan paling besar adalah Kecamatan Serasan Timur, yaitu 126 Ha. Pada urutan terluas kedua adalah Kecamatan Bunguran Barat, yaitu 117 Ha dan disusul Kecamatan Serasan pada urutan ketiga, sebesar 37 Ha.

Dari tabel 2.2 terlihat bahwa dari seluruh luas tanam tanaman pangan yang ada di Kabupaten Natuna, ternyata luas panen pada tahun 2014 meningkat lebih dari 10 persen dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2013 luas panen tanaman pangan sebesar 345 Ha dan meningkat menjadi 385 Ha pada tahun 2014. Peningkatan Luas panen ini disebabkan oleh meningkatnya luas panen tanaman padi, ubi kayu, dan kacang tanah. Luas panen kacang tanah tahun 2014 ini meningkat lebih dari dua belas kali lipat dibandingkan dengan luas panen tahun sebelumnya.



Tabel 2.2 Luas Panen Bahan Makanan Menurut Komoditas dan Kecamatan Tahun 2014 (Ha)

Kecamatan	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kedelai	Kacang Tanah	Jml
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Midai	-	1	2	1	-	-	4
2. Bunguran Barat	54	14	12	12	3	10	105
3. Bunguran Utara	-	6	5	1	-	-	12
4. Pulau Laut	-	-	-	-	-	-	-
5. Pulau Tiga	-	1	3	-	-	-	4
6. Bunguran Timur	8	3	2	-	-	-	13
7. Bunguran Timur Laut	-	-	-	-	-	-	-
8. Bunguran Tengah	14	3	3	-	4	2	26
9. Bunguran Selatan	-	8	7	5	1	5	26
10. Serasan	-	15	13	10	1	-	39
11. Subi	4	-	7	-	-	-	11
12. Serasan Timur	81	15	12	9	1	-	118
2014	161	66	66	38	10	17	385
2013	136	67	5	81	41	15	345

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Natuna

Kecamatan Bunguran Barat adalah kecamatan dengan luas panen terbesar di Kabupaten Natuna, disusul dengan Kecamatan Serasan Timur di urutan kedua. Di Kecamatan Bunguran Barat, luas panen padi 54 Ha, jagung 14 Ha, Ubi Kayu 12 Ha, Ubi Jalar 12 Ha, Kedelai 3 Ha, dan Kacang Tanah 10 Ha.



Peningkatan luas panen di Kabupaten Natuna pada tahun 2014 tidak terlalu berdampak pada peningkatan produksi hasil tanaman pangan. Terlihat dari tabel 2.3 bahwa produksi pada tahun 2013 dan tahun 2014 hanya selisih 0, 2 ton saja. Hal ini disebabkan adanya lahan-lahan yang sudah ditanami gagal panen ataupun terjadi penurunan kualitas hasil panennya itu sendiri. Dari berbagai jenis tanaman pangan pada umumnya mengalami peningkatan produksi, kecuali kacang tanah dan kedelai. Pada tahun 2014 produksi kacang tanah turun drastis, dari 92 ton pada tahun 2013 menjadi 10,2 ton pada tahun 2014. Sedangkan kedelai turun dari 40 ton pada tahun 2013 menjadi 11,9 ton di tahun 2014.



Tabel 2.3 Jumlah Produksi Bahan Makanan Menurut Komoditas dan Kecamatan Tahun 2014 (Ha)

Kecamatan	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kedelai	Kacang Tanah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Midai	-	2,1	7,5	2	-	-	64,5
2. Bunguran Barat	72	20,6	85	51	6,3	6	120,6
3. Bunguran Utara	-	12,6	18,75	2	-	-	11
4. Pulau Laut	-	-	-	-	-	-	0
5. Pulau Tiga	-	2,1	11,25	-	-	-	2
6. Bunguran Timur	8	6,3	7,5	-	-	-	20,8
7. Bunguran Timur Laut	-	-	-	-	-	-	23,5
8. Bunguran Tengah	33,6	6,3	11,25	-	3,2	1,2	176,4
9. Bunguran Selatan	-	16,8	26,25	10	0,8	3	49,5
10. Serasan	-	31,5	48,75	18	0,8	-	81,5
11. Subi	4	-	26,25	-	-	-	12
12. Serasan Timur	303,75	31,5	45	20	0,8	-	168
2014	421,35	129,8	288	103	11,9	10,2	729,8
2013	318	45	199	36	40	92	730

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Natuna

2.2 Sub Sektor Perkebunan

Sub sektor tanaman perkebunan terdiri dari berbagai tanaman seperti karet, kelapa, kelapa sawit dan sebagainya. Kondisi topografis Kabupaten Natuna berupa daerah



kepulauan dan banyak pantai/pesisir membuat luas lahan tanaman kelapa paling luas diantara tanaman perkebunan yang lainnya. Luas lahan tanaman kelapa tahun 2014 mencapai 14.005,5 Ha. Selain kelapa, tanaman perkebunan yang cukup banyak di Kabupaten Natuna adalah cengkeh dan karet. Lahan perkebunan cengkeh terluas ada di Kecamatan Serasan, yaitu 2.185 Ha. Sedangkan yang paling kecil ada di Kecamatan Pulau Laut, yaitu 350 Ha. Luas lahan perkebunan karet turun dari 4.287,5 Ha di tahun 2013 menjadi 4.169 Ha di tahun 2014. Perkebunan karet terluas ada di Kecamatan Bunguran Tengah, mencapai 1.132 Ha.



Tabel 2.4 Luas Lahan Tanaman Perkebunan Menurut Komoditas dan Kecamatan Tahun 2014 (Ha)

Kecamatan	Luas Lahan					
	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Cengkeh	Lada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Midai	105	2.595	-	-	893	14
2. Bunguran Barat	110	925	700	8	790	70
3. Bunguran Utara	165	1.990	-	6	690	11
4. Pulau Laut	100	1.100	-	-	350	-
5. Pulau Tiga	0	320	-	-	903	-
6. Bunguran Timur	980	1.390	-	6	1.075	23
7. Bunguran Timur Laut	576	3.145	-	14	1.590	14
8. Bunguran Tengah	1.132	40,5	-	-	-	-
9. Bunguran Selatan	706	1.050	-	8	1.375	-
10. Serasan	116	286	-	2,5	2.815	10,5
11. Subi	16	588	-	-	907	-
12. Serasan Timur	163	576	-	-	801	-
2014	4.169	14.005,5	700	44,5	12.189	142,5
2013	4.287,5	14.005,5	700	44,5	12.189	142,5

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna

Berdasarkan tabel 2.4 dan 2.5 luas lahan perkebunan kelapa sebesar 14.005,5 Ha menghasilkan produksi buah kelapa sebesar 6.012,2 Ton. Produksi kelapa terbesar ada di Kecamatan Midai, yaitu 950 ton. Tahun 2014 produksi karet



meningkat 39,5 ton dibandingkan tahun 2013, dengan produksi di Kecamatan Bunguran Tengah mencapai lebih dari 1000 ton. Sementara itu, pada tahun 2014 ini tanaman kelapa sawit belum menghasilkan produk dari luas lahan 700 Ha yang ada di Kecamatan Bunguran Barat.

Tabel 2.5 Jumlah Produksi Perkebunan Menurut Komoditas dan Kecamatan Tahun 2014 (Ton)

Kecamatan	Jumlah Produksi					
	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Cengkeh	Lada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Midai	30	950	-	-	900	0,5
2. Bunguran Barat	350	800	-	-	200	0,5
3. Bunguran Utara	189	850	-	0,5	135	-
4. Pulau Laut	55	350	-	-	30	-
5. Pulau Tiga	10	63	-	-	145	-
6. Bunguran Timur	1.000	600	-	0,5	50	0,5
7. Bunguran Timur Laut	750	900	-	-	80	0,5
8. Bunguran Tengah	1.670	4	-	-	-	-
9. Bunguran Selatan	125	450	-	-	900	-
10. Serasan	240	300	-	-	250	-
11. Subi	10	445	-	-	135	-
12. Serasan Timur	24	300	-	-	56	-
2014	4.443	6.012,2	-	1	2.881	2
2013	4.403,5	6.012,2	-	2,6	2.881	5,2

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna



Pada musim panen cengkeh orang-orang banyak yang pergi ke sentra-sentra penghasil cengkeh, khususnya di Kecamatan Midai yang terkenal sebagai pulau penghasil cengkeh di Kabupaten Natuna. Produksi cengkeh di Pulau Midai ini mencapai 900 ton pada tahun 2014 dan juga Kecamatan Bunguran Selatan.

2.3 Sub Sektor Peternakan

Sub sektor peternakan cukup berkembang di Kabupaten Natuna. Berbagai jenis ternak seperti sapi, kambing, ayam kampung, dan itik tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna. Untuk jenis ternak kerbau hanya terdapat di Kecamatan Serasan Timur sebanyak empat ekor. Secara umum ternak-ternak di Kabupaten Natuna mengalami penurunan jumlah di tahun 2014, kecuali sapi. Jumlah sapi meningkat 103 ekor di tahun 2014. Jumlah sapi di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Tengah, dan Bunguran Selatan lebih dari seribu ekor, dengan jumlahnya berturut-turut 1.589 ekor, 1.360 ekor, dan 1.309 ekor.



Tabel 2.6 Jumlah Ternak dan Unggas Menurut Kecamatan Tahun 2014 (Ekor)

Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kambing	Ayam Kampung	Itik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Midai	1.078	-	383	18.955	15
2.Bunguran Barat	759	-	352	9.640	450
3.Bunguran Utara	665	-	9	2.105	25
4.Pulau Laut	558	-	-	560	19
5.Pulau Tiga	42	-	62	2.155	195
6.Bunguran Timur	1.594	-	18	7.720	684
7.Bunguran Timur Laut	775	-	8	7.445	60
8.Bunguran Tengah	1.360	-	28	6.565	510
9.Bunguran Selatan	1.309	-	11	7.670	30
10.Serasan	78	-	-	1.145	305
11.Subi	342	-	82	3.520	32
12.Serasan Timur	124	4	478	6.410	635
2014	8.684	4	1.431	73.890	2.960
2013	8.581	5	1.433	76.175	3.183

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Natuna

2.4 Sub Sektor Perikanan

Berdasarkan sistem usahanya, subsektor perikanan dibedakan menjadi dua jenis yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap (nelayan). Sedangkan jika dilihat dari



lokasi/tempat usahanya sub sektor perikanan tangkap dibedakan menjadi perikanan tangkap di perairan umum (sungai, danau) dan perikanan tangkap di laut. Untuk perikanan budidaya terbagi menjadi perikanan budidaya di tambak, kolam, dan keramba.

Tabel 2.7 Jumlah RTP, Keramba, dan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan Tahun 2014

Kecamatan	Jml RTP	Jml Keramba	Produksi Budidaya Air Tawar (Ton)	Produksi Budidaya Air Laut (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Midai	20	22	-	2,22
2. Bunguran Barat	322	927	1,90	149,92
3. Bunguran Utara	78	105	-	12,12
4. Pulau Laut	42	98	-	21,55
5. Pulau Tiga	210	316	-	74,96
6. Bunguran Timur	72	151	111,59	37,48
7. Bunguran Timur Laut	25	3461	-	2,60
8. Bunguran Tengah	34	-	92,46	-
9. Bunguran Selatan	12	30	6,30	2,10
10. Serasan	170	396	5,32	68,62
11. Subi	55	32	-	3,23
12. Serasan Timur ¹⁾	-	-	-	-
2014	1.040	2.132	217,57	374,8
2013	935	1.861	175	10.551,93

Catatan * data masih tercakup di Kecamatan Serasan

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna



Jumlah RTP Kabupaten Natuna tersebar di semua kecamatan, dengan jumlah RTP terbanyak ada di Kecamatan Bunguran Barat, yaitu 322 rumah tangga. Pada tahun 2014 Jumlah RTP Kabupaten Natuna meningkat 11,2 persen jika dibandingkan dengan RTP tahun 2013. Jumlah keramba yang dimiliki RTP juga mengalami peningkatan, yaitu dari 1.861 keramba di tahun 2013 menjadi 2.132 keramba di tahun 2014.

Dilihat dari jenis ikan yang di budidaya, para petani di Kabupaten Natuna lebih banyak membudidayakan ikan air laut. Hal ini tidak mengherankan, mengingat wilayah Kabupaten Natuna yang berbentuk kepulauan dan memiliki wilayah laut yang cukup luas. Hampir di setiap kecamatan terdapat RTP yang membudidayakan ikan air laut. Produksi budidaya ikan laut pada tahun 2014 mencapai 364,8 ton dengan daerah penghasil terbesar adalah Kecamatan Bunguran Barat.

Disamping perikanan budidaya, terdapat juga perikanan tangkap yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Natuna. Jumlah RTP perikanan tangkap bertambah 302 rumah



tangga atau meningkat 9,1 persen dibandingkan tahun 2013. Kecamatan Bunguran Barat memiliki RTP perikanan tangkap terbanyak yaitu 460 rumah tangga. Meskipun tidak terlalu signifikan, produksi perikanan tangkap tahun 2014 ini mengalami peningkatan 3,2 persen dibandingkan tahun 2013.

Tabel 2.8 Jumlah RTP dan Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan Tahun 2014

Kecamatan	Jumlah RTP	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)
1. Midai	318	2.546,72
2. Bunguran Barat	460	10.723,40
3. Bunguran Utara	355	2.728,44
4. Pulau Laut	241	894,96
5. Pulau Tiga	360	8.372,80
6. Bunguran Timur	378	4.298,06
7. Bunguran Timur Laut	234	2.348,28
8. Bunguran Tengah	55	38,30
9. Bunguran Selatan	132	1.568,92
10. Serasan	802	11.995,70
11. Subi	284	1.826
12. Serasan Timur ^{*)}	-	-
2014	3.619	47.341,58
2013	3.317	45.864,68

Catatan * data masih tercakup di Kecamatan Serasan

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna

BAB III
HOTEL DAN PARIWISATA

<http://natunabps.bps.go.id>



BAB III

HOTEL DAN PARIWISATA

Sektor pariwisata memiliki peranan yang cukup penting dalam perekonomian suatu daerah, tidak terkecuali bagi Kabupaten Natuna. Dengan berkembangnya sektor pariwisata dan perhotelan maka akan menambah pendapatan daerah dari nilai pajak yang dibayarkan setiap tahunnya. Selain bermanfaat bagi pemerintah dari sisi pendapatan, berkembangnya sektor ini juga membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran. Hal ini tentunya dapat terlihat dari terciptanya berbagai jenis pekerjaan di sektor perhotelan dan pariwisata, mulai dari jasa kebersihan, tukang masak/koki, jasa angkutan, dan lain sebagainya.

3.1 Hotel

Dari dua belas kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna belum semuanya memiliki akomodasi/hotel non

bingtang sebagai sarana penunjang pariwisata yang ada. Kecamatan yang belum memiliki akomodasi yaitu Kecamatan Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, dan Serasan Timur. Sebagai pusat pemerintahan, tidak mengherankan jika jumlah akomodasi terbanyak ada di Kecamatan Bunguran Timur, yaitu 19 buah akomodasi. Sementara itu jumlah akomodasi di Kabupaten Natuna secara keseluruhan berkurang dari 44 akomodasi di tahun 2013 menjadi 42 akomodasi di tahun 2014. Meskipun jumlah akomodasi tahun 2014 menurun, tetapi jumlah kamar dan tempat tidur mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya perluasan usaha dari beberapa akomodasi yang sudah ada. Dari sisi tenaga kerjanya, pada tahun 2014 jumlah pekerja perempuan di bidang akomodasi lebih dominan dibandingkan pekerja laki-laki.



Tabel 3.1 Banyaknya Perusahaan Akomodasi/Hotel Non Bintang Menurut Kecamatan Tahun 2014

Kecamatan	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Tenaga Kerja	
				Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Midai	6	44	59	6	7
2. Bunguran Barat	6	69	76	5	8
3. Bunguran Utara	2	14	19	2	2
4. PulauLaut	1	9	9	3	3
5. PulauTiga	1	8	16	1	1
6. Bunguran Timur	19	342	466	37	40
7. Bunguran Timur Laut	-	-	-	-	-
8. Bunguran Tengah	-	-	-	-	-
9. Bunguran Selatan	-	-	-	-	-
10. Serasan	4	35	35	4	4
11. Subi	3	27	27	4	4
12. Serasan Timur	-	-	-	-	-
2014	42	548	707	62	69
2013	44	543	678	67	63

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna

3.2 Pariwisata

Kabupaten Natuna menghadirkan pesona alam yang luar biasa bagi para pengunjungnya. Topografi wilayah yang berbentuk kepulauan membuat objek wisata bahari/pantai

menjadi andalan untuk dikunjungi para wisatawan, khususnya di hari libur. Tercatat 54 wisata bahari/pantai yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Natuna. Kecamatan Bunguran Selatan menjadi kecamatan dengan objek wisata bahari/pantai yang terbanyak, yaitu 13 buah. Salah satu pantai yang sangat terkenal di Kecamatan Bunguran Selatan adalah Pantai Batu Kasah. Selain wisata bahari/pantai juga terdapat wisata air terjun, wisata gunung, dan situs bersejarah. Objek wisata air terjun terdapat di Kecamatan Bunguran Timur dan Bunguran Timur Laut.



Tabel 3.2 Jumlah Objek Wisata Menurut Jenis dan Kecamatan Tahun 2014

Kecamatan	Wisata Bahari/Pantai	Air Terjun	Wisata Gunung	Situs Bersejarah	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Midai	3	-	2	6	-
2. Bunguran Barat	2	-	6	7	-
3. Bunguran Utara	8	-	-	2	-
4. PulauLaut	5	-	-	3	-
5. PulauTiga	1	-	1	-	1
6. BunguranTimur	2	1	1	4	1
7. Bunguran Timur Laut	9	2	3	2	1
8. Bunguran Tengah	-	-	-	1	-
9. Bunguran Selatan	13	-	1	3	-
10. Serasan	5	-	3	2	-
11. Subi	4	-	-	12	-
12. SerasanTimur	2	-	3	-	-
Jumlah	54	3	20	42	3

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna

BAB IV
INDEKS HARGA

<http://naturalab.bps.go.id>



BAB IV INDEKS HARGA

Menurut UU no 25 Tahun 2004 pasal 31 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPSN) menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan diperlukan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kaitannya dengan hal ini, Badan Pusat Statistik berusaha menyajikan data dan informasi yang sekiranya berguna bagi pemerintah daerah dalam rangka perencanaan dan pembangunan. Data yang tidak kalah penting adalah data mengenai perkembangan harga dan pola konsumsi penduduk Kabupaten Natuna, yang tercermin dari angka inflasi. Dengan mengetahui perkembangan harga dari bulan ke bulan, tahun ke tahun maka diharapkan pemerintah daerah dapat membuat perencanaan dan kebijakan khususnya di bidang perekonomian untuk membawa Natuna menjadi kabupaten yang lebih maju ke depannya.



4.1 Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam satu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK setiap periode waktu tertentu inilah yang disebut dengan inflasi/deflasi. Inflasi mengukur kenaikan harga barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok dari suatu masyarakat. Berbagai barang dan jasa tersebut dikelompokkan menjadi tujuh kelompok, dari mulai bahan makanan sampai dengan yang terakhir yaitu transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

Secara umum inflasi di Kabupaten Natuna dari tahun 2012 sampai dengan 2014 terus mengalami peningkatan. Tahun 2012 inflasi sebesar 7,11 persen meningkat menjadi 8,43 persen di tahun 2013 dan kembali meningkat tipis di tahun 2014 menjadi 8,83.



**Tabel 4.1 Laju Inflasi Kabupaten Natuna Tahun 2012-2014
(persen)**

Indikator	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Umum	7,11	8,43	8,83
1. Bahan Makanan	8,34	8,83	8,59
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	12,77	7,53	9,48
3. Perumahan, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	6,83	7,64	6,48
4. Sandang	7,17	3,60	10,35
5. Kesehatan	-2,48	10,81	8,07
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	-0,54	6,54	4,60
7. Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-1,65	14,27	15,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna

Pada tahun 2014, IHK Kabupaten Natuna berada di kisaran 109 sampai dengan 118. Jika dilihat kondisi setiap bulannya, secara umum terjadi inflasi pada tahun 2014, kecuali pada Bulan April dan Bulan Oktober. Pada Bulan April terjadi deflasi sebesar 0,47 persen dan 0,25 persen di Bulan Oktober.

Deflasi pada Bulan April disebabkan kondisi cuaca yang mulai membaik paska musin angin utara. Oleh karena itu, transportasi laut sebagai jalur masuk sebagian besar barang/kebutuhan dari luar Kabupaten Natuna kembali berjalan normal. Sementara itu, inflasi tertinggi pada tahun 2014 terjadi pada Bulan Juli, yaitu 1,72 persen. Hal ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari adanya bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri yang membuat permintaan akan berbagai barang meningkat seperti bahan makanan dan sandang.



Tabel 4.2 Indeks Harga Konsumen, Laju Inflasi Kabupaten Natuna Tahun 2014

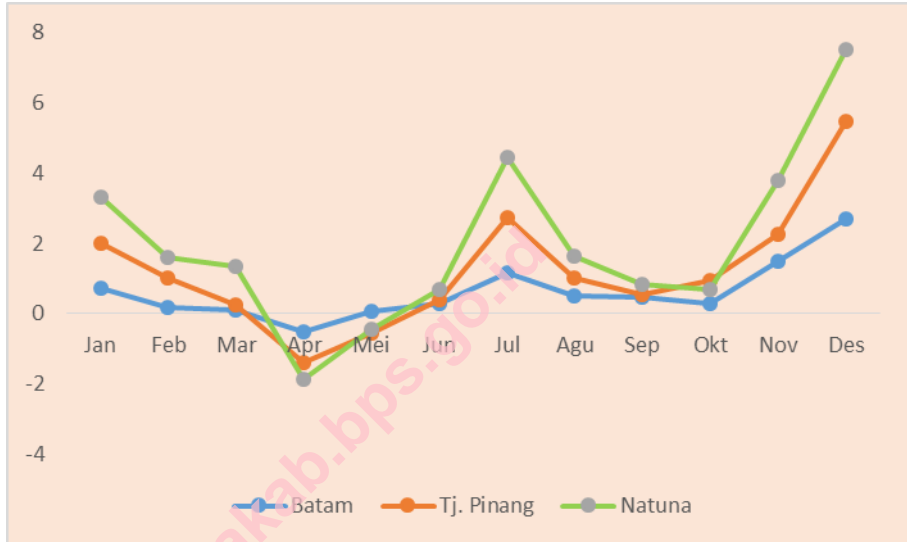
Bulan	IHK Umum	Laju Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)
Januari	109,68	1,34
Februari	110,29	0,56
Maret	111,48	1,08
April	110,96	-0,47
Mei	111,07	0,10
Juni	111,42	0,31
Juli	113,33	1,72
Agustus	114,02	0,60
September	114,34	0,28
Oktober	114,06	-0,25
Nopember	115,79	1,52
Desember	118,04	2,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna

Berdasarkan gambar 4.1 terlihat bahwa laju inflasi di Kabupaten Natuna, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang memiliki pola yang hampir sama. Dari ketiga kabupaten/kota yang ada di Kepulauan Riau, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Natuna yaitu 8,8 persen, disusul Kota Batam 7,4 persen, dan KotaTanjung Pinang sebesar 7,3 persen.



Gambar 4.1 Laju Inflasi Natuna, Batam dan Tanjung Pinang Tahun 2014



<http://natunakab.bps.go.id>

BAB V
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

<http://naturab.bps.go.id>



BAB V

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

PDRB merupakan keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB terbagi menjadi dua jenis yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) dan atas dasar harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu daerah. Selain untuk melihat pertumbuhan ekonomi, PDRB ini juga dapat digunakan untuk melihat tingkat perubahan barang dan jasa, struktur perekonomian serta alat kontrol dalam penentuan kebijakan pemerintah.

Seiring dengan berjalannya waktu serta perubahan perekonomian global, perlu kiranya BPS menyajikan data



mengenai perekonomian terkini melalui perubahan tahun dasar dari tahun dasar 2000 menjadi 2010 dalam penyusunan PDRB. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta mengimplementasikan *System National Account* (SNA) 2008. Perubahan yang cukup jelas terlihat adalah perubahan dari sembilan lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha.

5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Natuna terus mengalami kenaikan dari tahun 2012 hingga 2014. PDRB tanpa migas meningkat dari Rp 2,8 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp 3,0 triliun pada tahun 2013, dan meningkat kembali menjadi Rp 3,2 triliun di tahun 2014. Sementara itu, PDRB dengan migas berada di kisaran Rp 12 hingga Rp 13 triliun. Berdasarkan lapangan usahanya, sektor pertanian yang salah satunya terdiri dari sub sektor perikanan memiliki nilai tambah yang cukup besar yaitu lebih dari satu triliun setiap tahunnya. Hal ini sangat erat kaitannya dengan potensi perikanan di wilayah Kabupaten Natuna yang dikelilingi lautan luas.



Tabel 5.1 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian	1.224,76	1.281,93	1.334,81
2. Pertambangan dan Penggalian	9.573,97	9.953,94	10.209,41
3. Industri Pengolahan	87,73	92,20	96,79
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	9,17	9,41	9,67
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,76	0,80	0,84
6. Bangunan	731,96	799,60	873,64
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	277,62	303,76	326,64
8. Transportasi dan Pergudangan	58,38	67,86	73,22
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	47,24	49,91	53,12
10. Informasi dan Komunikasi	70,82	76,49	82,66
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	13,56	14,13	14,90
12. Real Estate	66,53	70,45	74,68
13. Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	215,73	229,54	244,51
15. Jasa Pendidikan	18,00	19,01	20,10
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	33,36	35,40	37,58
17. Jasa lainnya	7,69	7,96	8,29
PDRB DENGAN MIGAS	12.437,3	13.012,4	13.460,8
PDRB TANPA MIGAS	2.878,08	3.074,25	3.267,91

*Angka Sementara

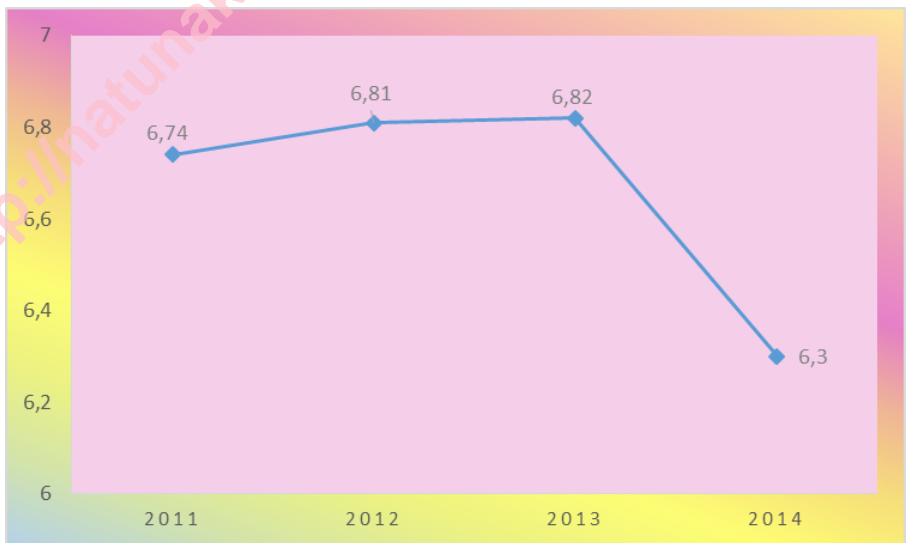
**Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna



Bersarkan gambar 5.1 terlihat bahwa selama tahun 2011 hingga 2013 Kabupaten Natuna mengalami pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Akan tetapi pada tahun 2014 terjadi perlambatan ekonomi dari 6,82 persen di tahun 2013 turun menjadi 6,3 persen. Perlambatan ekonomi ini diakibatkan oleh perlambatan ekonomi dunia yang akhirnya juga berimbas pada perekonomian daerah, tidak terkecuali Kabupaten Natuna.

Gambar 5.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna 2011-2014 (Persen)





Tabel 5.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha, 2011-2014 (Persen)

Lapangan Usaha (1)	2011 (2)	2012* (3)	2013** (4)	2014***
1. Pertanian	4,02	4,08	4,67	4,13
2. Pertambangan dan Penggalian	1,39	8,14	3,97	2,57
3. Industri Pengolahan	5,70	5,14	5,10	4,95
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	2,57	2,86	2,67	2,75
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,60	3,50	4,84	5,18
6. Bangunan	11,20	11,22	9,24	9,26
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,95	8,58	9,42	7,53
8. Transportasi dan Pergudangan	10,42	10,49	16,23	7,90
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,00	8,94	5,65	6,42
10. Informasi dan Komunikasi	7,90	7,97	8,01	8,06
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,34	4,32	4,16	5,50
12. Real Estate	5,79	5,86	5,89	6,01
13. Jasa Perusahaan	4,12	2,19	3,09	3,11
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,84	5,90	6,40	6,52
15. Jasa Pendidikan	5,23	5,42	5,64	5,71
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,01	6,04	6,12	6,14
17. Jasa lainnya	1,58	1,81	3,48	4,17
PDRB DENGAN MIGAS	2,58	7,93	4,63	3,45
PDRB TANPA MIGAS	6,74	6,81	6,82	6,30

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna



Dari 17 lapangan usaha pada tahun 2014, sebagian besar mengalami pertumbuhan yang positif. Akan tetapi pertumbuhan tersebut tidak terlalu signifikan, sehingga membuat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna secara keseluruhan tetap mengalami perlambatan. Lapangan usaha yang mengalami perlambatan hanya lima sektor, yaitu pertanian, petambangan, industri pengolahan, perdagangan serta transportasi dan pergudangan. Dari kelima sektor tersebut, sektor transportasi dan pergudangan adalah sektor yang mengalami perlambatan paling tinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2011 hingga 2013 tumbuh di atas 10 persen, maka pada tahun 2014 ini sektor transportasi dan pergudangan hanya tumbuh di angka 7,90 persen.

5.2 Struktur Perekonomian

PDRB Kabupaten Natuna atas dasar harga berlaku terus meningkat setiap tahunnya. Dari tahun 2011 sampai tahun 2014 PDRB Kabupaten Natuna meningkat lebih dari satu triliun setiap tahunnya. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2013.



Angka PDRB tahun 2013 sebesar Rp 15 triliun atau meningkat hampir Rp 2 triliun dibandingkan tahun 2012.

Tabel 5.3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2014 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha (1)	2011 (2)	2012 (3)	2013* (4)	2014**
1. Pertanian	1.226,17	1.354,98	1.529,97	1.632,82
2. Pertambangan dan Penggalian	9.460,08	10.772,83	11.940,30	12.579,53
3. Industri Pengolahan	87,83	95,50	106,01	115,34
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	10,91	12,76	14,04	13,73
6. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,74	0,79	0,89	0,95
6. Bangunan	751,10	852,47	985,74	1.115,53
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	275,77	305,84	340,53	388,93
8. Transportasi dan Pergudangan	55,46	65,77	82,71	112,45
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	44,02	49,92	57,74	65,20
10. Informasi dan Komunikasi	63,88	69,50	75,08	81,63
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	13,63	14,34	15,54	17,27
12. Real Estate	64,91	72,25	79,15	87,66
13. Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	210,52	537,84	261,01	315,00
15. Jasa Pendidikan	17,37	20,17	23,30	26,14
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	32,35	35,30	39,45	43,69
17. Jasa lainnya	7,68	8,37	9,17	9,92
PDRB DENGAN MIGAS	11.534,20	12.437,32	13.012,42	13.460,88
PDRB TANPA MIGAS	12.322,47	13.968,67	15.580,75	16.605,83

*Angka Sementara

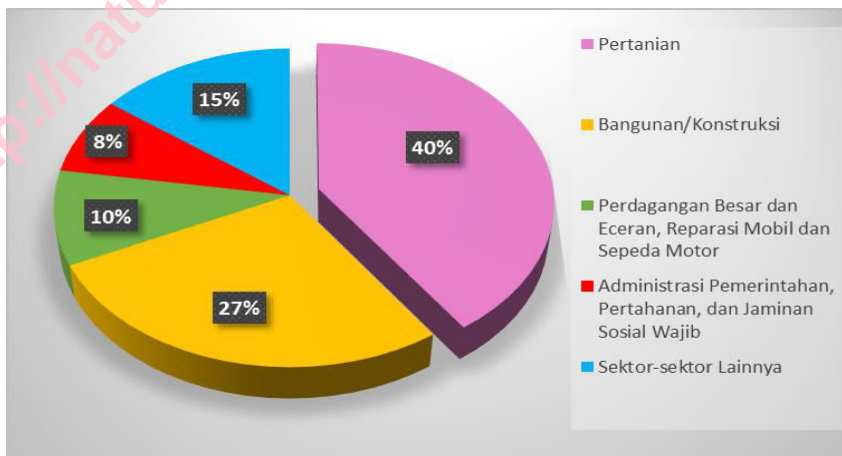
**Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna



Kontribusi dari 17 sektor yang menyusun PDRB Kabupaten Natuna ditampilkan pada gambar 5.2. Terlihat bahwa sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor tananam pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Natuna. Sementara itu diposisi kedua adalah sektor konstruksi sebesar 27 persen, disusul oleh sektor perdagangan dan administrasi pemerintahan. Sementara itu 15 persennya merupakan gabungan dari 13 sektor lainnya.

Gambar 5.2 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014



BAB VI
KEUANGAN

<http://naturalab.hps.go.id>



BAB VI KEUANGAN

Kuangan suatu daerah terdiri dari penerimaan dan belanja daerah yang sering disebut dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya APBD dapat diketahui berapa realisasi dari penerimaan daerah, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun pendapatan lain-lain yang sah. Selain itu APBD juga menunjukkan seberapa besar pengeluaran yang dilakukan suatu daerah melalui belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

6.1 Realisasi APBD

Realisasi penerimaan/pendapatan pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2014 mengalami penurunan 11,7 persen dibandingkan tahun 2013. Realisasi penerimaan tahun 2014 sebesar Rp 1,15 triliun, menurun dari tahun 2013 yang mencapai Rp 1,30 triliun. Pos pendapatan terbesar tahun 2014



berasal dari dana perimbangan yang mencapai 88,18 persen dari total pendapatan Kabupaten Natuna, disusul pendapatan daerah lain yang sah dan pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah Kabupaten Natuna tahun 2014 sebesar Rp 39,4 Milyar atau turun 4,5 persen dibandingkan tahun 2013. Penurunan pendapatan asli daerah ini lebih disebabkan oleh menurunnya penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2014 penerimaan pajak daerah turun 31,7 persen menjadi Rp 6,8 Milyar dibandingkan tahun sebelumnya.

<http://natunakab.bps.go.id>



Tabel 6.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna, 2013-2014 (Rp)

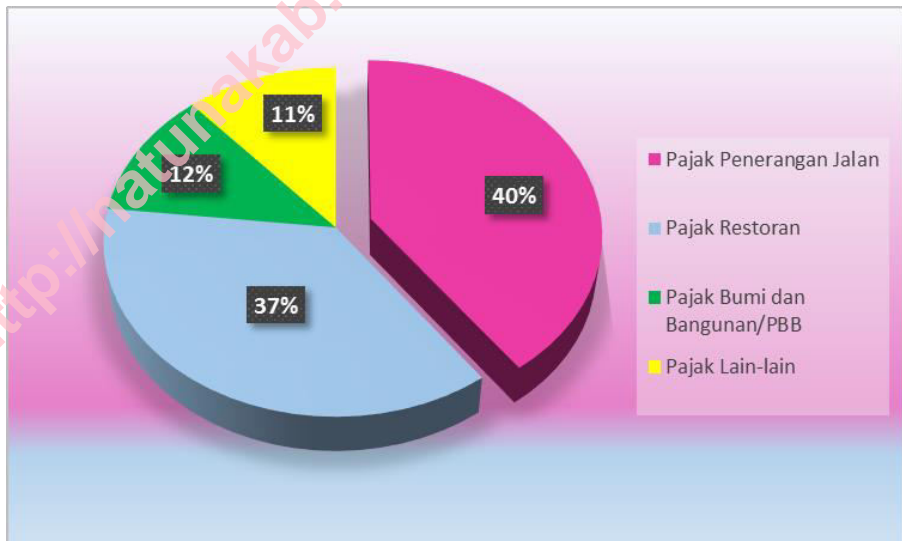
Uraian (1)	2013 (2)	2014 (3)
A. Pendapatan Asli Daerah	41.283.272.444	39.404.360.298
1. Pajak Daerah	9.979.240.379	6.812.492.330
2. Retribusi Daerah	624.467.317	1.150.914.983
3. Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	3.871.745.269	4.815.302.095
4. Lain-lain PAD yang Sah	26.807.819.479	26.625.650.890
B. Dana Perimbangan	1.189.093.916.614	1.019.680.093.777
1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	936.379.744.614	755.892.023.777
2. Dana Alokasi Umum	177.949.262.000	187.950.770.000
3. Dana Alokasi Khusus	74.759.910.000	75.837.300.000
C. Lain-lain Pendapatan yang Sah	79.470.004.877	97.226.485.546
1. Hibah	0	0
2. Dana Bagi Hasil Pajak	43.522.230.827	20.943.224.338
3. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	14.391.609.000	52.472.792.000
4. Bantuan Keuangan	21.322.341.492	23.810.469.208
5. Pendapatan Lainnya	233.823.558	0
Jumlah Penerimaan	1.309.842.193.936	1.156.310.939.622
A. Belanja Langsung	778.735.804.412	758.144.904.610
1. Belanja Pegawai	99.923.8643.848	90.543.068.485
2. Belanja Barang dan Jasa	371.481.447.249	406.986.732.186
3. Belanja Modal	307.330.493.315	260.615.103.948
B. Belanja Tidak Langsung	554.278.424.745	490.615.705.087
1. Belanja Pegawai	248.612.920.427	278.574.085.644
2. Belanja Subsidi	46.656.240.628	53.784.038.443
3. Belanja Hibah	73.889.076.750	40.751.500.000
4. Belanja Bantuan Sosial	146.572.948.000	79.415.840.000
5. Belanja Bantuan Keuangan	38.547.238.940	38.090.251.000
6. Belanja Tak Terduga	0	0
Jumlah Belanja	1.333.014.947.158	1.248.760.619.698

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna



Sementara itu realisasi belanja pemerintah daerah Kabupaten Natuna tahun 2014 sebesar Rp 1,24 Triliun atau turun 6,3 persen dibandingkan tahun 2013. Realisasi belanja pada tahun 2013 turun dari Rp 778,73 Milyar menjadi Rp 758,14 Milyar di tahun 2014. Sedangkan realisasi belanja tidak langsung juga mengalami penurunan dari Rp 554,27 Milyar menjadi Rp Rp 490,61 Milyar di tahun 2014.

Gambar 6.1 Realisasi Penerimaan Pajak Menurut Jenis Pajak Daerah, 2014





Penerimaan pajak daerah pada tahun 2014 sebesar Rp 6,8 Milyar. Penerimaan pajak terbesar berasal dari pajak penerangan jalan yaitu 40 persen, disusul pajak restoran sebesar 37 persen, serta pajak bumi dan bangunan sebesar 12 persen. Pajak reklame, pajak hiburan, dan lain sebagainya tergabung memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Natuna sebesar 11 persen.

<http://natunakab.bps.go.id>